

**RENCANA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	2
<b>PENDAHULUAN</b> .....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b> .....	7
<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Komunikasi Informatika.....	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	16
<b>BAB III</b> .....	18
<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	18
3.3 Program dan Kegiatan .....	19
<b>BAB IV</b> .....	21
<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	21
<b>BAB V</b> .....	22
<b>PENUTUP</b> .....	22
5.1 Kaidah Pelaksanaan .....	22
5.2 Rencana Tindaklanjut .....	23

### Lampiran

1. Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018).
2. Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN  
TENTANG RANCANGAN AWAL RENCANA  
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA TAHUN 2019  
Nomor : 050/ /2018  
Tanggal : Juni 2018

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi

acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD masing-masing dengan dikoordinir oleh Dinas Komunikasi Informatika. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n-1.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
  21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
  26. Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/047/31 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan untuk periode satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

### **BAB I. Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

### **BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

### **BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaannya.

### **BAB V. Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Renja Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2018 secara umum selaras dengan program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi Informatika 2016-2020 pada tahun ketiga (2018).

Hasil evaluasi program dan kegiatan Renja Tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal. Program dan kegiatan Renja Tahun 2018 belum selesai dilaksanakan, namun berikut terdapat perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renja Tahun 2018. Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2017 dan perkiraan realisasi capaian target / program Renja Tahun 2018 diuraikan pada **Lampiran 1**. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas Komunikasi Informatika secara keseluruhan.

##### Kegiatan :

##### a) Penyediaan jasa surat menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat adalah terwujudnya surat menyurat selama 1(satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.

##### b) Penyediaan alat tulis kantor

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan.

##### c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah tersedianya blangko-blangko dan barang cetakan serta penggandaan (fotocopy) selama 1 (satu) tahun.

##### d) Penyediaan makanan dan minuman

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya makan minum jamuan rapat selama 1(satu) tahun.

##### e) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Pencapaian kinerja kegiatan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.

**f) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah**

Pencapaian kinerja kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, dengan rincian sebagai berikut :

**a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor**

Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor selama 1 (satu) tahun.

Catatan : Penyedia jasa pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah UD FAIZ PRATAMA, dengan Nomor SPK 027.1/206/21 tertanggal 27 Oktober 2017.

**b) Pengadaan peralatan gedung kantor**

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor adalah tersedianya peralatan gedung kantor selama 1 (satu) tahun.

Catatan : Penyedia jasa pengadaan peralatan gedung kantor adalah:

- CV REKATAMA DIGITAL, dengan Nomor SPK 600/801/21 tertanggal 17 Nopember 2017.
- CV ANUGRAH PRATAMA, dengan Nomor Kontrak 027.1/PPKom/637/21/2017 tertanggal 27 Oktober 2017.
- PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI, dengan Nomor Kontrak 027.1/PPKom/639/21/2017 tertanggal 27 Oktober 2017.
- PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI, dengan Nomor Kontrak 027.1/PPKom/638/21/2017 tertanggal 27 Oktober 2017.

**c) Pengadaan mebeleir**

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan mebeleir dipergunakan untuk belanja pengadaan meja kursi kerja dan 1 (satu) set meja kursi tamu.

Catatan : Penyedia jasa pengadaan mebeleir adalah UD FAIZ PRATAMA, dengan Nomor SPK 027.1/160/21 tertanggal 3 Nopember 2017.

**d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah terpeliharanya gedung kantor selama 1 (satu) tahun.

Catatan : Penyedia jasa pemeliharaan gedung kantor adalah UD FAIZ PRATAMA, dengan Nomor SPK 027.1/261/21 tertanggal 24 Nopember 2017.

**e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 (satu) tahun.

**f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor adalah terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga selama 1 (satu) tahun.

**g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi**

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi dipergunakan untuk belanja pemeliharaan peralatan komunikasi dan informasi selama 1 (satu) tahun.

Catatan : Penyedia jasa pemeliharaan peralatan komunikasi dan informasi adalah

- CV TERA TEKNO SOLUSI, dengan Nomor SPK 600/745/21 tertanggal 10 Nopember 2017.
- CV TERA TEKNO SOLUSI, dengan Nomor SPK 600/642/21 tertanggal 26 Oktober 2017.
- CV CIPTA MULIA MANDIRI, dengan Nomor SPK 027.1/271/21 tertanggal 13 Nopember 2017.

**h) Pembuatan kartu identitas**

Pencapaian kinerja kegiatan pembuatan kartu identitas adalah terwujudnya ID Card untuk ASN se-Kabupaten Klaten selama 1 (satu) tahun.

Catatan : Penyedia jasa pembuatan kartu identitas adalah CV SIDU UTAMA, dengan Nomor SPK 027.1/148/21 tertanggal 18 Oktober 2017.

**3. Program Pengembangan Data/Informasi**

Pencapaian program pengembangan data/informasi adalah tersusunnya dokumen tentang informasi profil daerah di Kabupaten Klaten, dengan kegiatan sebagai berikut:

**a) Penunjang operasional penyusunan profil daerah**

Pencapaian kinerja penunjang operasional penyusunan profil daerah adalah terwujudnya buku profil daerah di Kabupaten Klaten selama 1 tahun.

**b) SIPD (2 POA)**

Pencapaian kinerja SIPD (2POA) adalah terwujudnya dokumen tentang informasi profil daerah di Kabupaten Klaten selama 1 tahun.

#### **4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

Pencapaian program pengembangan data/informasi/statistik daerah adalah tersusunnya buku data statistik di Kabupaten Klaten, dengan kegiatan sebagai berikut:

##### **a) Penyusunan data statistik perencanaan daerah**

Pencapaian kinerja penyusunan data statistik perencanaan daerah adalah terwujudnya buku data statistik di Kabupaten Klaten selama 1 tahun.

Catatan : Penyedia jasa pembuatan buku data statistik adalah CV SIDU UTAMA, dengan Nomor SPK 027.1/260/21 tertanggal 24 Nopember 2017.

#### **5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Pencapaian program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa adalah berkembangnya komunikasi, informasi dan media massa di Kabupaten Klaten, dengan kegiatan sebagai berikut:

##### **a) Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi**

Pencapaian kinerja pengembangan jaringan komunikasi dan informasi adalah terwujudnya akses internet di 50 OPD dan 10 website di Kabupaten Klaten selama 1 tahun.

Catatan : Penyedia barang belanja internet adalah PT TELKOM INDONESIA, Tbk dengan Kontrak tertanggal Pebruari 2017, PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA dengan Nomor Kontrak 600/628/21 tertanggal 23 Oktober 2017, Penyedia barang pengadaan personal komputer adalah CV TERA TEKNO SOLUSI dengan Nomor SPK 600/112/21 tertanggal 17 Maret 2017.

##### **b) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi**

Pencapaian kinerja kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi adalah terwujudnya 2 (dua).

##### **c) Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi**

Pencapaian kinerja penataan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah tertatanya dan terkendalinya menara telekomunikasi di Kabupaten Klaten.

##### **d) Penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet**

Pencapaian kinerja penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet adalah tertatanya dan terbinanya serta terawasinya warung internet di Kabupaten Klaten.

##### **e) Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)**

Pencapaian kinerja Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) adalah terfasilitasinya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)/ Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM).

## **6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**

Pencapaian program peningkatan kualitas perencanaan adalah tersusunnya buku rencana kerja dan laporan pengendalian internal Dinas Komunikasi Informatika, dengan kegiatan sebagai berikut:

### **a) Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD**

Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD adalah terwujudnya dokumen rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika.

### **b) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian program/kegiatan SKPD**

Pencapaian kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian program/kegiatan SKPD adalah terwujudnya laporan monev dan pengendalian internal Dinas Komunikasi Informatika.

## **7. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Pencapaian program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah terjawabnya aduan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:

### **a) Optimalisasi unit khusus penanganan pengaduan masyarakat**

Pencapaian kinerja kegiatan Optimalisasi unit khusus penanganan pengaduan masyarakat adalah jumlah aduan masyarakat yang terlayani.

Dari program/kegiatan yang direncanakan tidak semua dapat dilaksanakan sesuai target, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi
  - Penunjang operasional penyusunan profil daerah
  - Penyusunan data statistik perencanaan daerah
  - Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pengadaan mebebeir
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - SIPD (2POA)
  - Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
  - Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
  - Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi
  - Penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet
  - Fasilitasi KIM dan LKM
  - Monitoring, evaluasi da pengendalian program/kegiatan SKPD
  - Optimalisasi unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Tidak ada
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
- Adanya tambahan 8 kegiatan di perubahan anggaran, 1 kegiatan merupakan bantuan dari provinsi, 3 kegiatan merupakan pelimpahan dari Bagian Humas karena tusi ada di Dinas Komunikasi Informatika dan 4 kegiatan ajuan dari Dinas Komunikasi Informatika.
  - Adanya perubahan SK Bupati yang menyebabkan perubahan anggaran.
  - Tidak ada tambahan GU, sedangkan GU hanya sebesar Rp 25.000.000,00
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Banyak kegiatan yang tidak bisa mencapai target
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut
- Ada kegiatan yang di-TU-kan
  - Untuk GU diprioritaskan untuk pembelian barang/jasa dan honorarium.

Tabel penyajian hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana pada **Lampiran III**.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Dinas Komunikasi Informatika diharapkan dapat mendorong pertumbuhan serta pengembangan komunikasi, informasi dan media massa di

Kabupaten Klaten, sehingga Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten pada anggaran tahun 2017 mempunyai agenda-aksi, sebagaimana terlihat pada **Lamp IV**.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Komunikasi Informatika**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika masih terdapat permasalahan-permasalahan yang bisa menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil identifikasi ada permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, diantaranya adalah :

1. Keterbatasan alokasi anggaran, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana.
2. Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia di bidang Teknologi Informasi (TI), sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan di bidang Teknologi Informasi di Kabupaten Klaten
4. Disiplin aparatur yang belum optimal
5. Penyediaan data-data statistik yang kurang optimal

Dengan adanya permasalahan tersebut, hal ini bisa menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika. Adapun tantangan dan peluang dapat digambarkan melalui analisa SWOT adalah sebagai berikut:

#### **1. Identifikasi Faktor Internal**

Analisa ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan maupun kelemahan yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten.

##### **a. Kekuatan (Strength)**

- 1). Sudah ada Raperda tentang penyelenggaraan e-Government
- 2). Sudah ada kesadaran peran TIK didalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
- 3). Sudah memiliki pranata komputer disebagian besar OPD dan kecamatan
- 4). Sudah ada jaringan internet di masing-masing OPD
- 5). Dinas Kominfo menyiapkan sub-domain secara terpusat untuk masing-masing OPD
- 6). Jaringan intranet Kabupaten Klaten sudah dimanfaatkan untuk akses sistem informasi internal Kabupaten Klaten
- 7). Sudah memiliki jaringan hotspot untuk layanan public
- 8). Sudah ada jaringan WAN antar OPD menggunakan wireless
- 9). Kabupaten Klaten sudah memiliki website di <http://klatenkab.go.id>

10).Sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang menunjang dalam urusan internal dan pelayanan publik.

b. Kelemahan (Weaknesess)

- 1). Peran Dinas Kominfo belum optimal sebagai pengelola TIK yang terpusat
- 2). Belum optimalnya sinergi antar OPD untuk membangun e-Government
- 3). Jumlah SDM bidang TIK masih dirasa kurang
- 4). Tingkat ketersediaan (availability) jaringan intranet masih kurang
- 5). Masih kurangnya sistem pengamanan informasi
- 6). Belum ada integrasi sistem antar OPD dan antar aplikasi
- 7). Server aplikasi belum terpusat di Data Center
- 8). Masih belum optimalnya penggunaan email resmi Pemerintah Kabupaten Klaten @klatenkab.go.id

2. Identifikasi Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1). Ada keinginan untuk mewujudkan percepatan penyelenggaraan TIK
- 2). Ada keinginan untuk menerapkan kompetensi keahlian dibidang TIK
- 3). Ada keinginan untuk menerapkan sistem kinerja pemerintahan yang terintegrasi
- 4). Ada keinginan untuk mengimplementasikan aplikasi pengelolaan dan berbagi dokumen secara digital

b. Tantangan (Threats)

- 1). SDM TIK yang ada di OPD tidak focus dibidang TIK saja, tapi juga memiliki tupoksi dibidang lain
- 2). Belum optimalnya anggaran untuk pengembangan SDM TIK
- 3). Belum ada standar keamanan untuk infrastruktur jaringan yang ada
- 4). Belum optimalnya aplikasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan setelah adanya analisa terhadap kebutuhan yang disesuaikan dengan regulasi yang terus berkembang, sehingga perlu untuk memasukkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Dari hasil analisa kebutuhan ada beberapa kegiatan yang perlu untuk dimasukkan, antara lain:

1). Area wifi public

Dengan adanya akses wifi gratis di area public diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara ter-update dimanapun berada, dan dapat membantu mempromosikan area publik melalui media sosial mereka.

- 2). SDM pengelola website yang terlatih di OPD  
Dengan adanya undang-undang tentang keterbukaan Informasi Publik maka diharapkan setiap OPD mempunyai website dan ada satu admin yang terlatih untuk meng-update informasi yang ada dan meng-upload informasi yang menjadi hak public.
- 3). Pengiriman pelatihan SDM dari Dinas Kominfo  
Semakin berkembangnya Teknologi Informasi di Indonesia maka SDM dari Dinas Kominfo diharapkan bisa meningkatkan kemampuannya dalam bidang IT dengan cara Pendidikan dan Latihan tentang IT.
- 4). Seminar smart city  
Jawa tengah saat ini sedang proses untuk menjadi Smart Government sehingga Kabupaten Klaten dapat mengetahui apa tujuan dari Smart Government dan diharapkan kedepannya Kabupaten Klaten dapat menjadi Smart City yang sebelumnya didahului dengan Seminar Smart City.
- 5). Akun Medsos  
Setiap Organisasi perangkat daerah diharuskan aktif dalam pengelolaan media sosial, baik untuk menyampaikan informasi dari organisasi tersebut maupun untuk menjawab pengaduan masyarakat. Maka dari itu perlu diadakan pelatihan bagi admin organisasi untuk mengelola media sosial
- 6). IT aparatur desa yang terlatih  
Adanya ADD yang besar didesa, desa-desa berlomba-lomba untuk meningkatkan sarana dan prasarana IT nya akan tetapi dalam pemanfaatannya masih kurang optimal, sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemanfaatan IT di Desa dapat secara maksimal dirasakan oleh masyarakat.
- 7). Pranata computer yang difasilitasi  
Setelah dilantiknya Jabatan Pranata Komputer di Pemerintah Kabupaten Klaten maka Dinas Komunikasi Informatika menjadi Pembimbing dari ASN yang menjadi Fungsional Pranata Komputer, sehingga Prakom di Pemkab Klaten dapat terfasilitasi dengan baik.
- 8). Identifikasi jenis informasi dan persandian  
Informasi merupakan asset penting bagi suatu organisasi. Setiap organisasi memiliki informasi kritis atau sensitive atau rahasia yang menjadikannya salah satu sumberdaya strategis. Informasi berklarifikasi perlu dikelola secara khusus untuk mencegah terjadinya kebocoran.  
Informasi yang dikelola merupakan informasi public yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi dimaksud telah ditetapkan sebagai informasi berklarifikasi



oleh pimpinan organisasi pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya Pengelolaan Informasi Berklarifikasi di setiap organisasi. Dalam setiap informasi berklarifikasi yang telah dibuat oleh organisasi perlu diadakan uji konsekuensi publik oleh Dinas Kominfo Kabupaten Klaten, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan stakeholder terkait.

9). Implementasi operasional persandian oleh perangkat daerah

Dalam penyusunan Operasional persandian terhadap informasi yang berklarifikasi perlu adanya sosialisasi penyusunan informasi berklarifikasi sehingga dapat meningkatkan prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan, terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten, yaitu :

- 1) Usulan dari masyarakat Kecamatan Prambanan agar disediakan sarana prasarana pelayanan public berbasis IT (computer, Jaringan, Internet) di Sunggingan Wetan RT 04 RW 06 Pereng.

Tanggapan : Usulan disetujui, dan menjadi pokok bahasan dengan Tim Anggaran.

- 2) Usulan dari masyarakat Kecamatan Wedi agar disediakan sarana prasarana pelayanan public berbasis IT (computer, Jaringan, Internet) di Dk Tempel RT 00 RW 01 s.d RW 19 Pandes

Tanggapan : Usulan disetujui, dan menjadi pokok bahasan dengan Tim Anggaran.

- 3) Usulan dari masyarakat Kecamatan Bayat agar disediakan sarana prasarana pelayanan public berbasis IT (computer, Jaringan, Internet) di Balai Desa Tawangrejo RT/RW Tawangrejo.

Tanggapan : Usulan disetujui, dan menjadi pokok bahasan dengan Tim Anggaran.

- 4) Usulan dari masyarakat Kecamatan Trucuk agar disediakan sarana prasarana pelayanan public berbasis IT (computer, Jaringan, Internet) di Ibu Kota Kecamatan.

Tanggapan : Usulan disetujui, dan menjadi pokok bahasan dengan Tim Anggaran.

- 5) Usulan dari masyarakat Kecamatan Kebonarum agar disediakan sarana prasarana pelayanan public berbasis IT (computer, Jaringan, Internet) di RT/RW Malangjiwan.

Tanggapan : Usulan disetujui, dan menjadi pokok bahasan dengan Tim Anggaran.

- 6) Usulan dari masyarakat Kecamatan Manisrenggo agar disediakan sarana prasarana pelayanan public berbasis IT (computer, Jaringan, Internet) di Parangharjo RT 004 RW 002 Ngemplakseneng.

Tanggapan : Usulan disetujui, dan menjadi pokok bahasan dengan Tim Anggaran.

- 7) Usulan dari masyarakat Kecamatan Karangdowo agar disediakan sarana prasarana pelayanan public berbasis IT (computer, Jaringan, Internet) di RT/RW Kupang.

Tanggapan : Usulan disetujui, dan menjadi pokok bahasan dengan Tim Anggaran.

- 8) Usulan dari masyarakat Kecamatan Klaten Utara agar disediakan sarana prasarana pelayanan public berbasis IT (computer, Jaringan, Internet) di Desa Belangwetan RT/RW Belangwetan.

Tanggapan : Usulan disetujui, dan menjadi pokok bahasan dengan Tim Anggaran.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Kabupaten Klaten Tahun 2019**

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa				
	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Narto Sabdo Wedi Pandanaran Bayat Taman Lampion (2) Monumen Juang Aloon-aloon (2) Masjid Al Aqso Stadion Trikoyo Taman Gergunung	Jumlah area wifi publik	10 titik	
2	Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Kab. Klaten  Diskominfo	Jumlah SDM pengelola website yg terlatih Jumlah Akun Medsos Jumlah IT Aparatur desa yang terlatih Jumlah Pranata Komputer yang difasilitasi Jumlah frekuensi pengiriman pelatihan SDM dari Diskominfo Jumlah peserta seminar smart city	120 Orang  70 akun 400 orang  65 orang  3 kali  150 orang	
3	Program Peningkatan Persandian Daerah				
	Identifikasi jenis informasi dan persandian	Diskominfo	Jumlah dokumen yang berisi informasi berklarifikasi sandi	1 dokumen	
	Implementasi operasional persandian oleh Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah sosialisasi informasi berklarifikasi sandi	2 kali	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2019 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2019 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.1.** Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2019

<b>Kebijakan Pusat</b>	<b>Kebijakan Provinsi</b>	<b>Prioritas Pembangunan Kab Klaten</b>	<b>Program/ Kegiatan Renja 2019</b>
Terwujudnya Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kapasitas layanan komunikasi, informasi serta kerjasama kemitraan untuk mewujudkan masyarakat berbasis informasi</li><li>• Mendorong pemanfaatan telematika dalam rangka peningkatan pelayanan public</li></ul>	Membangun sistem komunikasi dan informatika di Kabupaten Klaten	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Klaten sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten menetapkan asumsi dan pilihan strategi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan system komunikasi dan informatika sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Klaten

Untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya system komunikasi dan informatika sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Klaten

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

#### **2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan mebelair
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi
7. Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor

#### **3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

#### **4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

1. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
3. Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi
4. Penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet
5. Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
6. Site Audit menara telekomunikasi
7. Penyusunan dokumen mikrocell menara telekomunikasi

**5) Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

**6) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**

1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

**7) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

**8) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan**

1. Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
2. Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan program kerja dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2019 dan perkiraan maju Tahun 2020 disertai target kinerja dan pendanaannya terlampir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2019 yang disusun merupakan pedoman sebagai arah kebijakan penyelenggaraan urusan wajib yaitu Urusan Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik. Sehingga Rencana Kerja Tahunan ini akan lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten.

#### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2019. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2019 tidak hanya memuat program-program dalam rangka kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

## 5.2 Rencana Tindaklanjut

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Dengan entre-point (pokok-pokok) rencana, sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema RKPD Tahun 2019 **"Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah"**
2. Proyeksi rencana belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 5.259.000.000,- untuk membiayai 10 program dengan 32 kegiatan.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2019 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni : **Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.**

Klaten, Juni 2018

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA KAB. KLATEN

SRI WINOTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630222 199003 1 007







**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

Tahun Anggaran 2019

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 10                      Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika  
**Organisasi** : 2 . 10 . 01                      DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 10 . 01 . 01                      Dinas Komunikasi dan Informatika

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.10 . 2.10.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100 Layanan administrasi kantor selama 12 bulan		98.250.000,00	113.501.920,00	107.251.920,00	60.996.160,00	380.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Kominfo	2500 surat	3	1.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Kominfo	2 orang	3	7.500.000,00	7.501.920,00	7.501.920,00	7.496.160,00	30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Kominfo	31 Jenis	3	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kominfo	35000 Lembar	3	4.500.000,00	4.500.000,00	3.750.000,00	2.250.000,00	15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kominfo	2 Jenis	3	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Kominfo	610 Orang	3	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wilayah Indonesia	75 Kali	3	63.500.000,00	75.000.000,00	74.000.000,00	37.500.000,00	250.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Wilayah Kabupaten Klaten	60 Kali	3	7.500.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	5.500.000,00	30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		100 Peningkatan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan		57.500.000,00	71.498.080,00	107.248.080,00	28.753.840,00	265.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kominfo	4 Jenis	3	25.000.000,00	29.998.080,00	29.998.080,00	15.003.840,00	100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Dinas Kominfo	2 Jenis	3	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kominfo	1 Gedung	3	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kominfo	2 Jenis	3	12.500.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	7.500.000,00	50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kominfo	6 Jenis	3	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.10 . 2.10.01 . 02 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi	Wilayah Kabupaten Klaten	1 Jenis	3	10.750.000,00	5.000.000,00	34.250.000,00	0,00	50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 55	Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor	Dinas Kominfo	2500 kartu	3	9.250.000,00	10.500.000,00	7.000.000,00	6.250.000,00	33.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Dinas Kominfo	60 Laporan kinerja dan keuangan yang disusun sebanyak 3 dokumen	3	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	3	5.000.000,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 15	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	Wilayah Kabupaten Klaten	53.60 Jumlah OPD terakses internet, jumlah web, Perbub dan menara telekomunikasi terdata	3	966.250.000,00	1.159.500.000,00	859.500.000,00	579.750.000,00	3.565.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02					Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	250 -	3	858.312.690,00	1.003.812.690,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Wilayah Kabupaten Klaten	5 Website	1	69.187.310,00	49.187.310,00	248.628.380,00	67.997.000,00	435.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Dinas Kominfo	2 Dokumen	3	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07	Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Wilayah Kabupaten Klaten	232 Menara	3	22.373.280,00	9.176.720,00	26.640.000,00	11.810.000,00	70.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet	Wilayah Kabupaten Klaten	100 Warnet	3	0,00	2.240.000,00	7.760.000,00	0,00	10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09	Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)	Kabupaten Klaten	26 Kelompok	3	16.376.720,00	34.073.280,00	6.700.000,00	7.850.000,00	65.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11	Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara Telekomunikasi	Kabupaten Klaten	1 Dokumen	3	0,00	1.010.000,00	5.400.000,00	3.590.000,00	10.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15	<b>Program Peningkatan Persandian Daerah</b>	Kabupaten Klaten	90 Jumlah dokumen yang berisi informasi berklarifikasi sandi	3	3.438.000,00	5.000.000,00	21.562.000,00	0,00	30.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01					Identifikasi Jenis Informasi dan Persandian	1 Dokumen	3	1.438.000,00	1.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 03	Implementasi Operasional Persandian oleh Perangkat Daerah	Kabupaten Klaten	2 kali	3	2.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	0,00	20.000.000,00

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.10 . 2.10.01 . 17	<b>Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>		33.33 Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi bagi ASN dan Perangkat Desa 120 Orang		0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Dinas Kominfo		3	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18	<b>Program kerjasama informasi dengan mass media</b>		90 Liputan event Kabupaten Klaten		140.812.000,00	176.000.000,00	130.188.000,00	93.000.000,00	540.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten Klaten	3 kali	3	111.757.040,00	143.205.000,00	104.197.960,00	40.840.000,00	400.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kabupaten Klaten	59 SKPD	3	29.054.960,00	32.795.000,00	25.990.040,00	52.160.000,00	140.000.000,00
4.03 . 2.10.01 . 27	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>		60 Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA		3.750.000,00	4.500.000,00	4.250.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
4.03 . 2.10.01 . 27 . 02	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	3 Dokumen	3	2.250.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	9.000.000,00
4.03 . 2.10.01 . 27 . 03	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	3 laporan	3	1.500.000,00	1.800.000,00	1.550.000,00	1.150.000,00	6.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					1.275.000.000,00	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00	765.000.000,00	5.100.000.000,00

Mengesahkan,  
**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

**MUH. HIMAWAN PURNOMO, SSTP, M.Si.**

NIP. 19761005 199602 1 004

KLATEN, 26 Desember 2018  
**Kepala Dinas Komunikasi Informatika**

**Drs Amin Mustofa MSi**

NIP. 19661115 1997101001

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN